RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PANGKAL PINANG







BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar belakang

Sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman, setiap organisasi publik saat ini lebih terbuka dan dapat memberikan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, organisasi publik diharapkan dapat membantu suatu dokumen rencana kerja (*work plan report*) yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 yang disusun ini merupakan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan yang mengacu pada rencana strategis (*strategic plan report*) tahun 2024-2026 dan serta sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Rencana strategis sebagaimana diketahui merupakan rencana umum lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut ke dalam rencana tahunan agar program, kegiatan dan sub kegiatan lebih terfokus. Dengan adanya rencana kerja yang telah tersusun dengan baik diharapkan kinerja organisasi dapat semakin baik dan lebih terfokus.

Rencana pembangunan tahunan organisasi perangkat daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai rencana tahunan, Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja merupakan dokumen yang secara substansial sebagai penerjemahan dari sasaran Pemerintah Kota Pangkal Pinang serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), dengan tetap memperhatikan arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan acuan setiap organisasi perangkat daerah untuk memasukkan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025;
3. Renja merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah dan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja sebagai wujud dari kinerja organisasi perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Mengingat arti strategis dokumen Renja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renstra mengacu kepada tata cara dan jalur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang secara substansial antara lain :

1. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu kepada RKPD Pemerintah Kota Pangkal Pinang tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja mengacu kepada program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 yang merupakan pelaksanaan paruh ketiga dari RPJPD Kota Pangkal Pinang Tahun 2007-2026.
3. Program dan kegiatan dalam Renstra selaras dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Kota Pangkal Pinang.
4. Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju tahun rencana selanjutnya.

Sasaran Pemerintah Kota Pangkal Pinang, yaitu "**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah**. Sesuai dengan tugas dan fungsinya Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang mempunyai tujuan yang mengarah pada pencapaian sasaran Pemerintah Kota Pangkal Pinang. Adapun tujuan Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang, yaitu : **"Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah perangkat daerah yang akuntabel dan berkualitas",** dengan sasaran meliputi :

1. Terwujudnya pelayanan prima pemerintahan daerah;
2. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang prima;
3. Meningkatnya efesiensi dan efektivitas anggaran daerah

1.2. Landasan Hukum

Berikut ini landasan hukum dalam penyusunan Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08 Seri E Nomor 4);
24. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 180).
25. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 224).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Perubahan Sekretariat Daerah ini adalah perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang. Sedangkan tujuan disusunnya Renja Sekretariat Daerah ini adalah untuk memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang, meliputi :

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Menjelaskan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) pada triwulan I tahun 2025 dan capaian Renstra Sekretariat Daerah, analisis kinerja pelayanan Sekretariat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, reviu terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan.

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah, serta program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB IV Penutup

Menjelaskan catatan penting dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang serta evalusi pencapaian indikator kinerja Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 yang disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini merupakan data dan informasi tentang akumulasi realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 pada triwulan I dibandingkan dengan pencapaian yang diharapkan dari penetapan target kinerja dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026. Berdasarkan hasil evaluasi ini dapat diketahui program dan kegiatan mana yang tidak memenuhi atau memenuhi dan/atau melebihi presentase pencapaian target kinerja hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) yang telah direncanakan.

Hasil dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan ukuran terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan pencapaian kinerja Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 dituangkan dalam bentuk matrik sebagaimana disajikan pada tabel 2.1 berikut :

TRIWULAN I

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	-	040101	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase kegiatan pimpinan daerah yang difasilitasi (Dengan Satuan:%)**	100	26.764.082.224	25	5.729.019.647	0	0		0		0	25	5.729.019.647	25	21	Kepala Bagian Umum
2		040101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100	16.636.693.696	25	4.132.797.175		0		0		0	25	4.132.797.175	25	25	Kepala Bagian Umum
3		040101202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan : Orang/ bulan)	95	16.636.693.696	99	4.132.797.175		0		0		0	99	4.132.797.175	104	25	Kepala Bagian Umum
8		040101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	1.753.480.488	25	367.505.493		0		0		0	25	367.505.493	25	21	Kepala Bagian Umum
9		040101206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	31.000.000	0	0		0		0		0	0	-	0	0	Kepala Bagian Umum
11		040101206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	407.633.352	1	55.193.392		0		0		0	1	55.193.392	100	14	Kepala Bagian Umum
12		040101206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	3.500.000		0		0		0		0	0	-	0	0	Kepala Bagian Umum
13		040101206006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	35.000.000		0		0		0		0	0	-	0	0	Kepala Bagian Umum
14		040101206008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)	1	495.000.000	1	182.349.900		0		0		0	1	182.349.900	100	37	Kepala Bagian Umum
15		040101206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	350.000.000	1	47.404.345		0		0		0	1	47.404.345	100	14	Kepala Bagian Umum

16		040101206010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	431.347.136	1	82.557.856		0		0		0	1	82.557.856	100	19	Kepala Bagian Umum
22		040101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:%)	100	1.412.445.264	25	346.169.708		0		0		0	25	346.169.708	25	25	Kepala Bagian Umum
23		040101208001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	1	237.445.264	1	46.407.544		0		0		0	1	46.407.544	100	20	Kepala Bagian Umum
24		040101208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	3	1.175.000.000	3	299.762.164		0		0		0	3	299.762.164	100	26	Kepala Bagian Umum
25		040101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100	2.712.552.608	25	288.411.624		0		0		0	25	288.411.624	25	11	Kepala Bagian Umum
26		040101209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	6	168.968.000	2	13.600.000		0		0		0	2	13.600.000	33	8	Kepala Bagian Umum
27		040101209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	25	1.395.483.552	5	123.438.680		0		0		0	5	123.438.680	20	9	Kepala Bagian Umum
28		040101209006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	1	289.950.176	1	28.771.696		0		0		0	1	28.771.696	100	10	Kepala Bagian Umum
29		040101209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	858.150.880	1	122.601.248		0		0		0	1	122.601.248	100	14	Kepala Bagian Umum
30		040101211	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah (Dengan Satuan:laporan)	4	1.521.301.200	1	230.323.480		0		0		0	1	230.323.480	25	15	Kepala Bagian Umum
31		040101211001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Dengan Satuan:Orang/Bulan)	2	721.301.200	1	153.280.000		0		0		0	1	153.280.000	50	21	Kepala Bagian Umum
34		040101211004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Dengan Satuan:Orang/Bulan)	2	800.000.000	1	77.043.480		0		0		0	1	77.043.480	50	10	Kepala Bagian Umum
35		040101212	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah laporan fasilitasi kerumah tanggaan Sekretariat Daerah (Dengan Satuan:laporan)	3	1.072.598.800	2	224.495.300		0		0		0	2	224.495.300	67	21	Kepala Bagian Umum
36		040101212001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	503.491.200	1	111.000.000		0		0		0	1	111.000.000	100	22	Kepala Bagian Umum

37		040101212002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	329.107.600	1	113.495.300		0		0		0	1	113.495.300	100	34	Kepala Bagian Umum
		040101212003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1	240.000.000	0	0		0		0		0	0	-	0	0	Kepala Bagian Umum
38		040101213	Penataan Organisasi	Jumlah laporan penataan organisasi (Dengan Satuan:laporan)	5	250.000.000		0		0		0		0	0	-	0	0	Kepala Bagian Organisasi
39		040101213001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	50.000.000	0	0		0		0		0	0	-	0	0	Kepala Bagian Organisasi
40		040101213002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dengan Satuan:Laporan)	1	50.000.000		0		0		0		0	0	-	0	0	Kepala Bagian Organisasi
41		040101213003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dengan Satuan:Dokumen)	1	50.000.000		0		0		0		0	0	-	0	0	Kepala Bagian Organisasi
42		040101213004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dengan Satuan:Dokumen)	1	50.000.000		0		0		0		0	0	-	0	0	Kepala Bagian Organisasi
43		040101213005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	50.000.000		0		0		0		0	0	-	0	0	Kepala Bagian Organisasi
44		040101214	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan (Dengan Satuan:laporan)	3	1.405.010.168	3	139.316.867		0		0		0	3	139.316.867	100	10	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
45		040101214001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Dengan Satuan:Laporan)	1	925.293.208	1	102.666.555		0		0		0	1	102.666.555	100	11	Kepala Sub Bagian Protokol
46		040101214002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Dengan Satuan:Laporan)	1	93.815.088	1	5.378.616		0		0		0	1	5.378.616	100	6	Kepala Sub Bagian Protokol
47		040101214003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Dengan Satuan:Laporan)	1	385.901.872	1	31.271.696		0		0		0	1	31.271.696	100	8	Kepala Sub Bagian Protokol
																	25,00	21,41	
48	-	040102	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN**	**Persentase fasilitasi produk hukum yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%)**	**100**	**9.119.713.082**	**25**	**190.209.032**		**0**		**0**		**0**	**25**	**190.209.032**	**25**	**2**	**Kepala Bagian Hukum**

			KESEJAHTERAAN RAKYAT	**Persentase perangkat daerah yang telah menyusun LPPD dengan benar dan tepat waktu (Dengan Satuan:%)**	**90**		**25**	**-**		**-**		**-**		**-**	**25**		**28**		**Kepala Bagian Pemerintahan**
49		040102201	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintah (Dengan Satuan:laporan)	3	169.682.000	2	20.251.176		0		0		0	2	20.251.176	67	12	Kepala Bagian Pemerintahan
50		040102201001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	45.250.000		0		0		0		0	0	-	0	0	Kepala Bagian Pemerintahan
51		040102201002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	58.892.000	1	10.190.840		0		0		0	1	10.190.840	100	17	Kepala Bagian Pemerintahan
52		040102201003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	65.540.000	1	10.060.336		0		0		0	1	10.060.336	100	15	Kepala Bagian Pemerintahan
53		040102202	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Dengan Satuan:laporan)	3	8.421.532.048	1	139.143.392		0		0		0	1	139.143.392	33	2	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
54		040102202001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (D e n g a n Satuan:Dokumen)	1	7.946.532.048	1	139.143.392		0		0		0	1	139.143.392	100	2	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
55		040102202002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dengan Satuan:Dokumen)	1	475.000.000	0	0		0		0		0	0	-	0	0	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
56		040102202003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dengan Satuan:Dokumen)	1	0	0	0		0		0		0	0	-	0	#DIV/0!	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
57		040102203	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum (Dengan Satuan:laporan)	3	247.989.034	3	30.814.464		0		0		0	3	30.814.464	100	12	Kepala Bagian Hukum
58		040102203001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	30	76.394.946	10	5.378.616		0		0		0	10	5.378.616	33	7	Kepala Bagian Hukum
59		040102203002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Dengan Satuan:Kasus)	5	100.443.392	2	10.757.232		0		0		0	2	10.757.232	40	11	Kepala Bagian Hukum

60		040102203003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dengan Satuan:Dokumen)	25	71.150.696	25	14.678.616		0		0		0	25	14.678.616	100	21	Kepala Bagian Hukum
61		040102204	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kerjasama Daerah (Dengan Satuan:laporan)	3	280.510.000	0	0		0		0		0	0	-	0	0	Kepala Bagian Pemerintahan
62		040102204001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dengan Satuan:Dokumen)	1	180.510.000	0	0		0		0		0	0	-	0	0	Kepala Bagian Pemerintahan
63		040102204002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri (Dengan Satuan:Dokumen)	1	100.000.000	0	0		0		0		0	0	-	0	0	Kepala Bagian Pemerintahan
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	**26,39**	**2,09**	
PREDIKAT KINERJA																			
65	-	**040103**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang sumber daya alam (Dengan Satuan:%)**	**100**	**2.403.954.228**	**25**	**221.976.551**		**0**		**0**		**0**	**25**	**221.976.551**	**25**	**9**	**Kepala Bagian Perekonomian**
				Persentase realisasi keuangan dan fisik penyerapan dana APBD (Dengan Satuan:%)	**87**		**17**							**17**		**20**		**Asisten Perekonomian dan Pembangunan**
66		040103201	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian (Dengan Satuan:laporan)	4	171.088.000		0		0		0		0	0	-	0	0	Kepala Bagian Perekonomian
67		040103201001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dengan Satuan:Dokumen)	2	54.883.000		0		0		0		0	0	-	0	0	Kepala Bagian Perekonomian
68		040103201002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Dengan Satuan:Laporan)	4	116.205.000		0		0		0		0	0	-	0	0	Kepala Bagian Perekonomian
69		040103202	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan (Dengan Satuan:%)	3	1.001.163.368	2	102.093.080		0		0		0	2	102.093.080	67	10	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
70		040103202001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	255.304.888		0		0		0		0	0	-	0	0	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
71		040103202002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Dengan Satuan:Laporan)	1	701.315.088	1	93.335.848		0		0		0	1	93.335.848	100	13	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
72		040103202003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Dengan Satuan:Laporan)	1	44.543.392	1	8.757.232		0		0		0	1	8.757.232	100	20	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

73		040103203	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	JumlahLaporan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dengan Satuan:laporan)	3	1.215.268.860	3	119.883.471		0		0		0	3	119.883.471	100	10	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
74		040103203001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dengan Satuan:Dokumen)	1	409.518.860	1	60.119.007		0		0		0	1	60.119.007	100	15	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
75		040103203002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dengan Satuan:Dokumen)	1	609.046.228	1	31.135.848		0		0		0	1	31.135.848	100	5	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
76		040103203003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Dengan Satuan:Orang)	10	196.703.772	3	28.628.616		0		0		0	3	28.628.616	30	15	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
77		040103204	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam (Dengan Satuan:laporan)	1	16.434.000		0		0		0		0	0	-	0	0	Kepala Bagian Perekonomian
78		040103204001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dengan Satuan:Dokumen)	1	16.434.000		0		0		0		0	0	-	0	0	Kepala Bagian Perekonomian
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																**22,27**	**9,23**	
PREDIKAT KINERJA																		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)																		
PREDIKAT KINERJA																		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	**Pelaksanaan kegiatan didukung dengan sumber daya manusia dan anggaran**
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	**Adanya efisiensi anggaran yang secara tidak langsung mengurangi optimalisasi kinerja**
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	**Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan**
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kota berikutnya:	- -

Pangkal Pinang, 07 Pebruari 2025

SEKRETARIS DAERAH,

MIE GO, S.T., M.Si

NIP. 19730107 200003 1 005

Hasil evaluasi Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2025 pada triwulan I, bahwa pencapaian kinerja belum optimal dari target yang ditetapkan begitu juga realisasi anggaran belum maksimal dikarenakan pelaksanaan kegiatan masih dalam tahap proses pelaksanaan belum maksimal begitu juga realisasi anggaran masih dalam proses pencairan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkal Pinang yang memuat tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang adalah sebagai berikut :

1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :
    a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Pemerintah Kota;
    b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
    c. Pemantauan dan evaluasi pelaksananaan kebijakan Pemerintah Kota;
    d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara Pemerintah Kota;
    e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, indikator pelayanan yang tercakup dalam kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dalam urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang administrasi pemerintahan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah terhadap beberapa kendala, antara lain :

1. Belum optimalnya penyampaian data yang dibutuhkan dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan;
2. Peningkatan kualitas koordinasi dan komitmen pimpinan serta jajarannya dalam penyelenggaraan tata kelola dan pelayanan administrasi pemerintahan;
3. Kurangnya sinkronisasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan baik yang disebabkan karena perubahan aturan di kementerian/lembaga dan juga keterlambatan perangkat daerah untuk mengakomodir aturan yang berlaku.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah fungsi penunjang bidang urusan administrasi pemerintahan, program, kegiatan dan sub kegiatan tahun rencana 2025 berdasarkan RKPD Perubahan Tahun 2025 serta hasil analisis kebutuhan disajikan dalam tabel berikut.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD PERUBAHAN
TAHUN 2025

Kode					Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan			
					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Target Capaian Kinerja	Pagu Induk (Rp)	Target Capaian Kinerja	Pagu Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang	Catatan
1					2	3	4	5	6	10	11	12	13
					Total Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				**38.287.749.534,00**		**38.753.936.810,40**	**466.187.276,40**	
xx	**xx**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Terlaksananya Kegiatan Bagian Umum**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Bagian Umum**	**100 %**	**25.109.072.056,00**	**100 %**	**25.528.233.328,40**	**419.161.272,40**	
xx	***xx***	***01***	***2.01***		***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Terpenuhinya Penyampaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu***	***Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu***	***100 %***	***-***	***100 %***	***-***	***-***	
xx	xx	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	-	0 Laporan	-	-	
xx	***xx***	***01***	***2.02***		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP***	***Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP***	***100 %***	***16.636.693.696,00***	***100 %***	***17.125.109.264,40***	***488.415.568,40***	
xx	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 orang/ bulan	16.636.693.696,00	95 orang/ bulan	17.125.109.264,40	488.415.568,40	
xx	xx	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	
xx	***xx***	***01***	***2.03***		***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Terlaksananya penataan barang milik perangkat daerah***	***Persentase barang milik perangkat daerah yang ditata dan diinventarisir***	***100 %***	***-***	***2 Dokumen***	***-***	***-***	
xx	xx	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	
xx	***xx***	***01***	***2.05***		***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Menurunnya pelanggaran disiplin pegawai perangkat daerah***	***Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN***	***-10 %***	***-***	***-10 %***	***-***	***-***	
xx	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	-	5 Orang	-	-	

					Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan			
xx	***xx***	***01***	***2.06***		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah***	***Persentase pelaksanaan administrasi umum Perangkat daerah***	***100***	***%***	***1.753.480.488,00***	***100***	***%***	***1.979.659.488,00***	***226.179.000,00***	
xx	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	31.000.000,00	1	Paket	17.520.000,00	- 13.480.000,00	
xx	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	-	2	Paket	-	-	
xx	xx	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	-	2	Paket	-	-	
xx	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	407.633.352,00	1	Paket	366.702.352,00	- 40.931.000,00	
xx	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	3.500.000,00	2	Paket	1.750.000,00	- 1.750.000,00	
xx	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	35.000.000,00	1	Dokumen	35.000.000,00	-	
xx	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	495.000.000,00	1	Laporan	777.340.000,00	282.340.000,00	
xx	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	350.000.000,00	1	Laporan	350.000.000,00	-	
xx	xx	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	431.347.136,00	1	Dokumen	431.347.136,00	-	
xx	***xx***	***01***	***2.07***		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Terlaksananya pengadaan barang milik perangkat daerah***	***Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah***	***100***	***%***	***-***	***100***	***%***	***-***	***-***	
xx	xx	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Unit	-	1	Unit	-	-	
xx	xx	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	Unit	-	1	Unit	-	-	
xx	xx	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	-	1	Unit	-	-	

					Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan				
xx	xx	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	-	1	Unit	-	-	
xx	***xx***	***01***	***2.08***		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksananya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah***	***Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah***	***100***	***%***	***1.412.445.264,00***	***100***	***%***	***1.412.445.264,00***	***-***	
xx	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	237.445.264,00	1	Laporan	237.445.264,00	-	
xx	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	1.175.000.000,00	1	Laporan	1.175.000.000,00	-	
xx	xx	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	-	0	Laporan	-	-	
xx	***xx***	***01***	***2.09***		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terpeliharanya barang milik perangkat daerah***	***Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik***	***100***	***%***	***2.712.552.608,00***	***100***	***%***	***2.107.119.312,00***	***- 605.433.296,00***	
xx	xx	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	Unit	168.968.000,00	6	Unit	85.168.000,00	- 83.800.000,00	
xx	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	Unit	1.395.483.552,00	25	Unit	851.370.256,00	- 544.113.296,00	
xx	xx	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1	Unit	-	0	Unit	-	-	
xx	xx	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	Unit	289.950.176,00	1	Unit	268.630.176,00	- 21.320.000,00	
xx	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	858.150.880,00	1	Unit	901.950.880,00	43.800.000,00	
xx	***xx***	***01***	***2.11***		***Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah***	***Terfasilitasinya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah***	***Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah***	***4***	***Laporan***	***1.521.301.200,00***	***4***	***Laporan***	***1.571.301.200,00***	***50.000.000,00***	
xx	xx	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Orang/ Bulan	721.301.200,00	1	Orang/ Bulan	721.301.200,00	-	

					Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan			
xx	xx	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	-	4	Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	
xx	xx	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	-	2	Orang	-	-	
xx	xx	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	800.000.000,00	2	Orang/ Bulan	800.000.000,00	-	
xx	***xx***	***01***	***2.12***		***Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah***	***Tersusunnya Laporan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah***	***Jumlah Laporan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah***	***3 Laporan***	***1.072.598.800,00***	***3***	***Laporan***	***1.332.598.800,00***	***260.000.000,00***	
xx	xx	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	503.491.200,00	1	Paket	503.491.200,00	-	
xx	xx	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	329.107.600,00	0	Paket	329.107.600,00	-	
xx	xx	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	240.000.000,00	1	Paket	500.000.000,00	260.000.000,00	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik perangkat daerah**	**Persentase peningkatan indeks kepuasan masyarakat**	**90 %**	**250.000.000,00**	**90**	**%**	**203.100.000,00**	**- 46.900.000,00**	
xx	***xx***	***01***	***2.13***		***Penataan Organisasi***	***Tersusunnya Laporan Penataan Organisasi***	***Jumlah Laporan Penataan Organisasi***	***5 Laporan***	***250.000.000,00***	***5***	***Laporan***	***203.100.000,00***	***- 46.900.000,00***	
xx	xx	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	50.000.000,00	1	Dokumen	39.775.000,00	- 10.225.000,00	
xx	xx	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	50.000.000,00	1	Laporan	39.775.000,00	- 10.225.000,00	
xx	xx	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	50.000.000,00	1	Dokumen	39.775.000,00	- 10.225.000,00	
xx	xx	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	50.000.000,00	1	Dokumen	44.000.000,00	- 6.000.000,00	

					Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan				
xx	xx	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Dokumen	50.000.000,00	1	Dokumen	39.775.000,00	-	10.225.000,00	
xx	**xx**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Terpenuhinya kegiatan pimpinan daerah yang difasilitasi**	**Persentase kegiatan pimpinan daerah yang difasilitasi**	**100**	**%**	**1.405.010.168,00**	**100**	**%**	**1.314.303.628,00**	**-**	**90.706.540,00**	
xx	***xx***	***01***	***2.14***		***Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan***	***Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan***	***Jumlah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan***	***3***	***Laporan***	***1.405.010.168,00***	***3***	***Dokumen***	***1.314.303.628,00***	***-***	***90.706.540,00***	
xx	xx	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1	Laporan	925.293.208,00	1	Laporan	850.293.208,00	-	75.000.000,00	
xx	xx	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1	Laporan	93.815.088,00	1	Laporan	89.055.088,00	-	4.760.000,00	
xx	xx	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1	Laporan	385.901.872,00	1	Laporan	374.955.332,00	-	10.946.540,00	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**											
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**											
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Terpenuhinya penyampaian laporan LPPD perangkat yang benar dan tepat waktu**	**Persentase perangkat daerah yang telah menyusun LPPD dengan benar dan tepat waktu**	**85**	**%**	**169.682.000,00**	**85**	**%**	**134.012.000,00**	**-**	**35.670.000,00**	
4	***01***	***02***	***2.01***		***Administrasi Tata Pemerintahan***	***Tersusunnya Laporan Administrasi Tata Pemerintahan***	***Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan***	***3***	***Laporan***	***169.682.000,00***	***3***	***Laporan***	***134.012.000,00***	***-***	***35.670.000,00***	
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1	Dokumen	45.250.000,00	1	Dokumen	36.780.000,00	-	8.470.000,00	
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1	Dokumen	58.892.000,00	1	Dokumen	49.642.000,00	-	9.250.000,00	
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1	Dokumen	65.540.000,00	1	Dokumen	47.590.000,00	-	17.950.000,00	
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan**		**100**	**%**	**8.421.532.048,00**	**100**	**%**	**8.406.532.048,00**	**-**	**15.000.000,00**	

					Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan				
4	***01***	***02***	***2.02***		***Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat***	***Tersusunnya rumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat***	***Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang ditindak lanjuti***	***100***	***%***	***8.421.532.048,00***	***100***	***%***	***8.406.532.048,00***	***-***	***15.000.000,00***	
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	Dokumen	7.946.532.048,00	1	Dokumen	7.941.532.048,00	-	5.000.000,00	
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1	Dokumen	475.000.000,00	1	Dokumen	465.000.000,00	-	10.000.000,00	
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-		-	
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum daerah**	**Persentase fasilitasi produk hukum yang dilaksanakan**	**100**	**%**	**247.989.034,00**	**100**	**%**	**247.982.734,00**	**-**	**6.300,00**	
4	***01***	***02***	***2.03***		***Fasilitasi dan Koordinasi Hukum***	***Tersusunnya Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum***	***Jumlah Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum***	***3***	***Laporan***	***247.989.034,00***	***3***	***Laporan***	***247.982.734,00***	***-***	***6.300,00***	
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	25	Dokumen	76.394.946,00	25	Dokumen	76.390.646,00	-	4.300,00	
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5	Kasus	100.443.392,00	5	Kasus	100.441.392,00	-	2.000,00	
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	20	Dokumen	71.150.696,00	115	Dokumen	71.150.696,00		-	

					Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan			
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Terwujudnya kerjasama daerah**	**Persentase kerjasama daerah yang dilaksanakan**	**100**	**%**	**280.510.000,00**	**100**	**%**	**241.265.000,00**	**- 39.245.000,00**
4	***01***	***02***	***2.04***		***Fasilitasi Kerjasama Daerah***	***Tersusunnya Laporan Fasilitasi Kerjasama Daerah***	***Jumlah Laporan Fasilitasi Kerjasama Daerah***	***2***	***Laporan***	***280.510.000,00***	***2***	***Laporan***	***241.265.000,00***	***- 39.245.000,00***
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1	Dokumen	180.510.000,00	1	Dokumen	146.265.000,00	- 34.245.000,00
4	01	02	2.04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1	Dokumen	100.000.000,00	1	Dokumen	95.000.000,00	- 5.000.000,00
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1	Laporan	-	1	Laporan	-	-
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Terkendalinya inflasi daerah**	**Persentase peningkatan pengendalian inflasi daerah**	**100**	**%**	**171.088.000,00**	**100**	**%**	**148.449.000,00**	**- 22.639.000,00**
4	***01***	***03***	***2.01***		***Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian***	***Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian***	***Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian***	***4***	***Laporan***	***171.088.000,00***	***4***	***Laporan***	***148.449.000,00***	***- 22.639.000,00***
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2	Dokumen	54.883.000,00	2	Dokumen	43.921.500,00	- 10.961.500,00
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4	Laporan	116.205.000,00	4	Laporan	104.527.500,00	- 11.677.500,00
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Terpenuhinya penyerapan dana APBD yang efektif dan efisien**	**Persentase realisasi keuangan dan fisik penyerapan dana APBD**	**85**	**%**	**1.001.163.368,00**	**85**	**%**	**909.381.396,00**	**- 91.781.972,00**
4	***01***	***03***	***2.02***		***Pelaksanaan Administrasi Pembangunan***	***Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan***	***Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan***	***3***	***Laporan***	***1.001.163.368,00***	***3***	***Laporan***	***909.381.396,00***	***- 91.781.972,00***
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1	Dokumen	255.304.888,00	1	Dokumen	187.722.916,00	- 67.581.972,00
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1	Laporan	701.315.088,00	1	Laporan	677.115.088,00	- 24.200.000,00
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1	Laporan	44.543.392,00	1	Laporan	44.543.392,00	-

					Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan			
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Terpenuhinya penyerapan dana APBD yang efektif dan efisien**	**Persentase pengadaan barang yang dilaksanakan**	**100**	**%**	**1.215.268.860,00**	**100**	**%**	**1.606.833.676,00**	**391.564.816,00**	
4	***01***	***03***	***2.03***		***Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa***	***Tersusunnya Laporan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa***	***Jumlah Laporan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa***	***3***	***Laporan***	***1.215.268.860,00***	***3***	***Laporan***	***1.606.833.676,00***	***391.564.816,00***	
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1	Dokumen	409.518.860,00	1	Dokumen	732.561.980,00	323.043.120,00	
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1	Dokumen	609.046.228,00	1	Dokumen	668.000.000,00	58.953.772,00	
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	10	Orang	196.703.772,00	10	Orang	206.271.696,00	9.567.924,00	
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Terpenuhinya kebijakan di bidang sumber daya alam**	**Persentase pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang sumber daya alam**	**100**	**%**	**16.434.000,00**	**100**	**%**	**13.844.000,00**	**- 2.590.000,00**	
4	***01***	***03***	***2.04***		***Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam***	***Tersusunnya Laporan Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam***	***Jumlah Laporan Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam***	***1***	***Laporan***	***16.434.000,00***	***1***	***Laporan***	***13.844.000,00***	***- 2.590.000,00***	
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1	Dokumen	16.434.000,00	1	Dokumen	13.844.000,00	- 2.590.000,00	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaran pembangunan jangka menengah pada Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang. Untuk mencapai tujuan tersebut Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang merencanakan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan, sebagai berikut, yaitu :

Tujuan : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah perangkat daerah yang akuntabel dan berkualitas

Sasaran :
1. Terwujudnya pelayanan prima pemerintahan daerah;
2. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif;
3. Meningkatnya efesiensi dan efektivitas anggaran daerah

Strategi :
1. Optimalisasi kualitas pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Optimalisasi peran serta pihak lain dalam penilaian kinerja pelayanan publik
3. Optimalisasi peran perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintah
4. Optimalisasi koordinasi dengan perangkat daerah dan melakukan evaluasi penyerapan anggaran secara berkala

Arah Kebijakan :
1. Meningkatkan sosialisasi, koordinasi dan sinkronisasi data dalam penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Meningkatkan sistem kerja serta sarana dan prasarana pelayanan publik
3. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pihak lain dalam penyelenggaran pemerintahan
4. Meningkatkan penerapan aplikasi penganggaran dan pengadaan barang dan jasa dalam penyerapan anggaran
5. Peningkatan transparansi pengadaan barang dan jasa dan terkendalinya inflasi

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel sebagai berikut ini :

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula/ Rumus	Satuan	Target 2024
Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang yang akuntabel dan berkualitas		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.	Nilai	72,50
	Terwujudnya pelayanan prima pemerintahan daerah	Indeks Pelayanan Publik	Hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan	Nilai	87,50
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif	Persentase penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efektif	Jumlah penyelenggaraan kegiatan yang telah terealisasi / Jumlah penyelenggaraan kegiatan yang direncanakan dalam renja x 100%	%	100
	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas anggaran daerah	Persentase penyerapan anggaran pemerintah daerah	Jumlah belanja APBD tahun berkenaan yang terealisasi tahun berkenaan / Jumlah total APBD pada tahun berkenaan X 100 %	%	88

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam Renja Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 terdapat 3 (tiga) program, 20 (dua puluh) kegiatan dan 59 (lima puluh sembilan) sub kegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.

Seluruh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu :

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Tahun	
				2025	
				K	Rp
1	2	3	4	5	6
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	**Nilai**	**72,55**	**47.086.363.102**
		Indeks Pelayanan Publik	**Nilai**		***32.922.703.914***
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	**Terlaksananya Kegiatan Bagian Umum**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Bagian Umum**	**%**	**100**	**31.442.703.914**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP***	***Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP***	***%***	***100***	***16.015.538.914***
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan	97	16.015.538.914
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***Terlaksananya penataan barang milik perangkat daerah***	***Persentase barang milik perangkat daerah yang ditata dan diinventarisir***	***%***	***100***	***141.836.000***
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	141.836.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Menurunnya pelanggaran disiplin pegawai perangkat daerah***	***Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN***	***%***	***-15***	***50.000.000***
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	50.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah***	***Persentase pelaksanaan administrasi umum Perangkat daerah***	***%***	***100***	***3.800.008.500***
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	64.557.500
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	957.754.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	328.744.500
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	158.168.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	65.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1.715.122.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	500.000.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	10.662.500

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Terlaksananya pengadaan barang milik perangkat daerah***	***Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah***	***%***	***100***	***773.213.000***
Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	130.918.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	190.918.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	451.377.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Terlaksananya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah***	***Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah***	***%***	***100***	***3.103.272.000***
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	4.600.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	1.175.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1.923.672.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Terpeliharanya barang milik perangkat daerah***	***Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik***	***%***	***100***	***3.508.663.500***
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	252.768.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	25	1.315.544.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	541.679.500
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1.398.672.000

Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	***Terfasilitasinya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah***	***Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah***	***Laporan***	***4***	***1.971.301.200***
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/ Bulan	2	721.301.200
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	4	150.000.000
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	100.000.000
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/ Bulan	2	1.000.000.000
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	***Tersusunnya Laporan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah***	***Jumlah Laporan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah***	***Laporan***	***3***	***2.078.870.800***
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	1	503.491.200
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	1	429.107.600
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	1	1.146.272.000
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik perangkat daerah**	**Persentase peningkatan indeks kepuasan masyarakat**	**%**	**95**	**320.000.000**
Penataan Organisasi	***Tersusunnya Laporan Penataan Organisasi***	***Jumlah Laporan Penataan Organisasi***	***Laporan***	***5***	***320.000.000***
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	1	100.000.000
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	1	100.000.000
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	1	50.000.000
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	1	20.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	1	50.000.000

PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	**Terpenuhinya kegiatan pimpinan daerah yang difasilitasi**	**Persentase kegiatan pimpinan daerah yang difasilitasi**	**%**	**100**	**1.160.000.000**
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	***Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan***	***Jumlah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan***	***Laporan***	***3***	***1.160.000.000***
Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	1	800.000.000
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	1	60.000.000
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	1	300.000.000
		Persentase penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efektif	***%***	**100**	**10.527.214.400**
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**Terpenuhinya penyampaian laporan LPPD perangkat yang benar dan tepat waktu**	**Persentase perangkat daerah yang telah menyusun LPPD dengan benar dan tepat waktu**	**%**	**90**	**491.799.900**
Administrasi Tata Pemerintahan	***Tersusunnya Laporan Administrasi Tata Pemerintahan***	***Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan***	***Laporan***	***3***	***491.799.900***
Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	1	100.000.000
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	1	241.800.000
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	1	149.999.900
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**Tersusunnya rumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat**	**Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang ditindak lanjuti**	**%**	**100**	**9.296.272.000**
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	***Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat***	***Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat***	***Laporan***	***3***	***9.296.272.000***
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	8.193.450.000
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	1	1.000.000.000

Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	1	102.822.000
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**Terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum daerah**	**Persentase fasilitasi produk hukum yang dilaksanakan**	**%**	**100**	**364.142.500**
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	***Tersusunnya Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum***	***Jumlah Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum***	***Laporan***	***3***	***364.142.500***
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	30	108.445.000
Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	5	150.000.000
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	25	105.697.500
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**Terwujudnya kerjasama daerah**	**Persentase kerjasama daerah yang dilaksanakan**	**%**	**100**	**375.000.000**
Fasilitasi Kerjasama Daerah	***Tersusunnya Laporan Fasilitasi Kerjasama Daerah***	***Jumlah Laporan Fasilitasi Kerjasama Daerah***	***Laporan***	***3***	***375.000.000***
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	1	200.000.000
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	1	150.000.000
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	1	25.000.000
		Persentase Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah	***%***	**89**	**3.636.444.788**
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**Terkendalinya inflasi daerah**	**Persentase peningkatan pengendalian inflasi daerah**	**%**	**100**	**299.953.000**
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	***Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian***	***Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian***	***Laporan***	***4***	***299.953.000***
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	2	99.998.000
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	4	199.955.000

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**Terpenuhinya penyerapan dana APBD yang efektif dan efisien**	**Persentase realisasi keuangan dan fisik penyerapan dana APBD**	**%**	**87**	**1.477.017.388**
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	***Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan***	***Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan***	***Laporan***	***3***	***1.477.017.388***
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	1	479.717.388
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	1	898.800.000
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	1	98.500.000
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**Terpenuhinya penyerapan dana APBD yang efektif dan efisien**	**Persentase pengadaan barang yang dilaksanakan**	**%**	**100**	**1.832.898.400**
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	***Tersusunnya Laporan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa***	***Jumlah Laporan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa***	***Laporan***	***3***	***1.832.898.400***
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	1	840.080.500
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	1	747.455.000
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	12	245.362.900
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**Terpenuhinya kebijakan di bidang sumber daya alam**	**Persentase pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang sumber daya alam**	**%**	**100**	**26.576.000**
Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	***Tersusunnya Laporan Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam***	***Jumlah Laporan Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam***	***Laporan***	***1***	***26.576.000***
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	1	26.576.000

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai misi Pemerintah Kota Pangkal Pinang dan mendukung tercapainya visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pangkal Pinang. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini akan dijadikan sebagai acuan bagi Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta pelaksanaan program dan kegiatan.

Tindak lanjut dari Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 adalah adanya masukan, informasi, saran dan data untuk melakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya sehingga menghasilkan perencanaan yang prospektif, realistis, dan akuntabel serta transparan dalam rangka mewujudkan pembangunan berasaskan keadilan untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tidak terlepas dari bantuan dan dukungan seluruh aparatur Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 dan semoga dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat.